

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu dan teknologi yang berkembang dengan cepat dewasa ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola kehidupan manusia secara pribadi, maupun terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai perubahan yang terjadi berpengaruh pula terhadap sistem nilai dan budaya bangsa, yang selanjutnya berpengaruh pada tata-hubungan antar manusia dan antar bangsa. Serentak dengan laju pembangunan, terjadilah dinamika masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan. Terjadilah perubahan sikap tentang nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menimbulkan pula terjadinya pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan pada interaksi manusia dalam masyarakatnya dan antara bangsa - bangsa yang ada di dunia ini.

Telah diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini menjadi sangat utama bagi negara Indonesia yang sedang berusaha menciptakan kondisi hidup masyarakatnya yang lebih baik dalam wujud masyarakat adil dan makmur merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Adapun pembahasan tentang kebudayaan tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan pendidikan. Eratnya hubungan antara kebudayaan dan pendidikan tersebut dikemukakan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (1986 : 2) pada tanggal 12 Januari 1986 di Jakarta sebagai berikut ini.

Pendidikan berlangsung dalam suatu iklim budaya, bahkan tak terlepas dari matriks kebudayaan yang menjadi bumi persemaian identitas bangsa. Sedangkan kebudayaan memerlukan usaha pelestarian melalui pendidikan yang menyadarkan kepentingan perservasi nilai-nilai budaya yang turun-temurun. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan gersang dari nilai - nilai luhur, sedangkan kebudayaan tanpa pendukung-pendukung yang sadar dan terdidik akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai dan akhirnya siam dalam perjalanan sejarah.

Dari rumusan di atas dapatlah dikatakan, bahwa pendidikan di Indonesia tentunya juga berusaha memberikan peluang untuk pemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai kemahiran lainnya, akan tetapi tidak mungkin upaya itu mengabaikan keharusan untuk bertujuan membangun kepribadian Indonesia seutuhnya, yang merupakan ciri keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, perguruan tinggi sebagai lembaga formal tertinggi di Indonesia harus mampu berperan dan memberikan sumbangan yang positif, di samping membentuk manusia yang memiliki sikap dan kompetensi keilmuan. Kebutuhan akan adanya program pendidikan tinggi tersebut terungkap dari Dasar Kebijakanaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , yang tercantum dalam Program Kurikulum Perguruan Tinggi, No. Skep. 0140/U/1975 :

... pendidikan tinggi hendaknya menghasilkan tenaga ahli sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD'45. Selain daripada itu tenaga-tenaga yang dihasilkan harus memiliki nilai-nilai sosial

budaya yang harus hidup dan kemampuan mengembangkan perspektif kebudayaan yang memberi wadah dan mengisi secara khas kepribadian bangsa yang dinamis.

Selanjutnya digariskan dalam kebijaksanaan tersebut :

...tanggung jawab utama pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan adalah mengembangkan kemampuan serta kecakapan dalam diri mahasiswa serta masyarakat luas untuk mampu berpikir dengan berorientasi kepada kepentingan bangsa serta kemanusiaan, baik pada waktu sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang, dengan menggunakan pola-pola yang obyektif, dan analitis, yang dapat menghasilkan persepsi serta konsepsi yang tepat.

Rumusan-rumusan di atas pada dasarnya sejalan dengan Dasar dan Tujuan Pendidikan Nasional, yang dicantumkan dalam GBHN sesuai dengan Tap. MPR No. IV/MPR/1983 sebagai berikut :

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Namun demikian, Tujuan Pendidikan Nasional seperti dikemukakan di atas, tidak mungkin tercapai hanya melalui pembekalan peserta didik dengan pengetahuan atau teknologi yang dapat menjadikannya sebagai seorang ahli belaka. Ia diharapkan pula sebagai pemeluk agama yang baik, warga negara yang sadar dan berdisiplin, anggota keluarga yang bahagia, individu yang mampu mengembangkan diri, dan membangun lingkungan hidupnya, baik itu lingkungan alamiah maupun lingkungan alam. Hal ini menjadi lebih utamalagi kepentingannya mengingat berbagai kondisi lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh M.Habib Mustopo (1983:14-15) berikut ini.

Dewasa ini kita dihadapkan kepada tiga masalah yang saling berkaitan yaitu :

- 1) Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, dengan latar belakang sosio-budaya yang beraneka ragam. Kemajuan masyarakat tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan...
- 2) Pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu berupa terjadinya pergeseran sistem nilai budaya, penyikapan anggota masyarakat terhadap nilai-nilai budaya...
- 3) Kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi masa, transportasi, membawa pengaruh terhadap intensitas kontak budaya antar suku maupun dengan kebudayaan dari luar. Khusus dengan terjadinya kontak budaya dengan kebudayaan asing itu bukan hanya intensitasnya menjadi lebih besar, tetapi juga penyebarannya berlangsung dengan cepat dan luas jangkauannya.

Dari uraian di atas tampak bahwa kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tercapainya tujuan program perguruan tinggi dalam rangka peran - serta-nya terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

Kondisi lingkungan ini berpengaruh pula terhadap mahasiswa selaku peserta didik perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kepada merekalah antara lain dibebankan pencapaian tujuan lembaga tersebut, yang ditunjukkan melalui kompetensi-kompetensi yang berhasil diperolehnya.

Berkenaan dengan hal ini James S. Coleman (1965 : 95) mengemukakan rumusan Fischer tentang fungsi perguruan tinggi yang penting sekali artinya terhadap kedudukan dan peranan mahasiswa, yaitu perubahan (change), mobilitas, sosialisasi, akulturasi dan pembentukan golongan elite. Lima fungsi perguruan tinggi itu menurut Fischer khususnya berlaku bagi Indonesia.

Di samping kelima fungsi itu, di Indonesia sering didengungkan bahwa mahasiswa selaku satu komponen generasi muda menanggung beban sebagai generasi penerus, yaitu generasi yang kelak akan meneruskan membangun negara ini. Lebih dari komponen-komponen pemuda lainnya, mahasiswa dianggap sebagai komponen yang lebih terdidik dan terpelajar. M. Weiner (1966 : Ch.VI), mengemukakan, karena pendidikannya ini, maka mahasiswa seharusnya menjadi kreatif, imajinatif dan mereka diharapkan mempunyai pelibatan diri yang lebih besar dalam masalah-masalah kemasyarakatan.

Besarnya tuntutan yang dikenakan terhadap para mahasiswa serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, tampaknya merupakan faktor-faktor psikologis yang harus dihadapi oleh mahasiswa Indonesia.

Dan tentang kondisi lingkungan yang kurang mendukung ini, apabila M. Habib Mustopo di atas mengambil titik-tolak dari bentuk masyarakat Indonesia yang pluralistik serta dari segi pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi, maka Koentjaraningrat lebih menitikberatkan pada sifat-sifat kelemahan yang telah membudaya pada masyarakat Indonesia. Ciri-ciri mental negatif tersebut diidentifikasi oleh Koentjaraningrat (1984 : 45) sebagai berikut : "(1) Sifat mentalitas yang meremehkan mutu; (2) Sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) Sifat tak percaya pada diri sendiri; (4) Sifat tak berdisiplin murni; dan (5) Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh".

Selanjutnya Soerjono Soekanto (1984:59-60) mengemukakan kalau asumsi di atas dijadikan pegangan sementara, maka dikhawatirkan akan timbulnya kecenderungan - kecenderungan pada mahasiswa sebagai berikut: (1) belajar atau studi semata-mata untuk lulus; (2) mempelajari bahan - bahan studi dengan ruang lingkup yang sesempit mungkin; (3) kurangnya daya kreasi dan inovasi; (4) kurangnya kemampuan mengambil inisiatif yang mempunyai akibat positif untuk masa depan; (5) cepat-cepat menyelesaikan studi tanpa memperhatikan mutu.

Kekhawatiran akan timbulnya kecenderungan - kecenderungan negatif demikian, sering sekali menjadi dasar pemikiran pengarahan-pengarahan yang dikemukakan oleh para pengelola pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1986 : 4), pada tanggal 12 Januari 1986, di antaranya mengemukakan sebagai berikut ini.

... upaya pendidikan adalah ikhtiar upaya untuk memberikan kesempatan "to have" serta memantapkan kesadaran "to be". Pendidikan di Indonesia tentunya juga berusaha memberikan peluang untuk pemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai kemahiran lainnya, dan tetapi tidak mungkin upaya itu mengabaikan keharusan untuk bertujuan membangun kepribadian Indonesia seutuhnya. Segala pemilikan itu tidak lain adalah "perpanjangan" dari suatu pusat yang sadar akan diri pribadinya "to be Indonesian".

Tampak jelas bahwa pendidikan sangat diandalkan untuk dapat membantu terbentuknya ketahanan nasional, yang diwujudkan di lembaga perguruan tinggi dengan memberikan pembekalan pada mahasiswa suatu pendidikan yang dapat membentuk kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan

kompetensi kemasyarakatan .

Adapun program pendidikan di lembaga perguruan tinggi yang diandalkan untuk membentuk kompetensi pribadi dan kemasyarakatan adalah program Pendidikan Umum, yang mata kuliahnya disebut Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

Diandalkannya program Pendidikan Umum atau MKDU di perguruan tinggi untuk dapat mencapai kebutuhan-kebutuhan yang telah diterakan di atas, sangatlah beralasan, terutama dalam hubungan dengan peranannya bagi pembentukan pribadi mahasiswa, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Dep. P dan K (1983:6), sebagai berikut ini.

Mendidik manusia Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan Bangsa Indonesia serta berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia..., tidak mungkin melalui pembekalan peserta-didik dengan ilmu pengetahuan atau teknologi atau seni yang mereka perlukan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya kelak. Hidup dan peran seseorang dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara jauh lebih paripurna sifatnya dari sekedar manusia berilmu, terampil, atau ahli belaka. Mereka diharapkan sebagai pemeluk agama yang baik, warga negara yang sadar, dan berdisiplin, anggota keluarga yang bahagia, individu yang mampu mengembangkan diri dan membangun lingkungan hidupnya, baik itu lingkungan alamiah maupun lingkungan alam. Landasan ideal yang dikutip di atas meyakinkan dan memberi petunjuk para pengembang kurikulum pendidikan tinggi, untuk merancang program pendidikan di perguruan tinggi yang lebih menjawab tuntutan harapan GBHN dan KDPPT yang telah disepakati bersama. Benar kiranya ungkapan "a well educated man becomes not necessarily a cultured man". Oleh karena itu untuk menguasai kebudayaan secara kuat adalah melalui penguasaan program Pendidikan Dasar Umum yang merupakan unsur formal dan menentukan sifatnya dalam anatomi kurikulum perguruan tinggi Indonesia.

Dari rumusan di atas tampak betapa pentingnya penyelenggaraan program Pendidikan Umum di perguruan tinggi

dalam upaya agar mahasiswa memiliki penguasaan kebudayaan secara kuat, dan mengingat pula kenyataan meningkatnya kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini, yang mempengaruhi masyarakat untuk berkembang semakin cepat dan rumit. Perubahan ini mengakibatkan timbulnya pergeseran nilai - nilai bagi masyarakat Indonesia, termasuk di antaranya pada mahasiswa. Dalam pergeseran nilai-nilai ini, selalu terdapat kemungkinan para mahasiswa menjadi masa bodoh atau putus asa, suatu sikap yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang terpelajar. Bagaimanapun juga mahasiswa adalah orang-orang muda yang sedang mempelajari cara memberikan tanggapan dan penilaian terhadap apa yang terjadi atas dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Sudah barang tentu ia perlu dibimbing untuk menemukan cara terbaik yang sesuai dengan dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan masyarakat sekitarnya.

Secara langsung maupun tidak langsung program Pendidikan Umum di perguruan tinggi dibebani tugas dan tanggungjawab yang besar untuk dapat mewujudkan perilaku yang diharapkan tersebut. Terlebih-lebih bagi perguruan tinggi seperti IKIP Bandung, tugas dan tanggungjawab tersebut menjadi lebih utama lagi, sesuai dengan peranan IKIP itu sendiri dalam pengembangan dan pembinaan lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Darji Darmodiharjo (1981 : 11), sebagai berikut ini.

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sebagai suatu lembaga pendidikan tenaga kependidikan, memegang peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan

kemampuan bagi berbagai jenis tenaga kependidikan terutama guru. Tenaga kependidikan yang dihasilkannya diharapkan mampu mengembangkan dan membina pendidikan secara keseluruhan... Dalam melaksanakan peranan dan tugasnya itu IKIP harus selalu tanggap terhadap pembaharuan, perubahan, dan upaya-upaya lain yang diarahkan kepada peningkatan mutu pendidikan ... Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ke arah terwujudnya manusia seutuhnya melalui lembaga pendidikan formal ialah upaya pengembangan dan pembinaan sekolah sebagai pusat kebudayaan.

Dari uraian di atas tampak peranan IKIP sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah mempersiapkan tenaga kependidikan, yaitu mahasiswa sebagai calon guru, yang memiliki kemampuan-kemampuan memadai untuk melaksanakan peranan dan tugasnya.

Adapun jenis kemampuan yang telah dituangkan ke dalam kurikulum lembaga perguruan tinggi, termasuk IKIP, yang dibebankan kepada program Pendidikan Umum atau MKDU untuk dapat dicapai, tertera pada rumusan tujuan program Pendidikan Umum dalam Kurikulum Inti MKDU (1983 : vii-viii) sebagai berikut ini.

Secara spesifik program Mata Kuliah Dasar Umum bertujuan menghasilkan warga negara sarjana yang berkualifikasi sebagai berikut :

- a. berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia;
- b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain;
- c. memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan maupun kebudayaan;
- d. memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan

serta meningkatkan kualitasnya maupun tentang lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta di dalam pelestariannya.

Dari berbagai kemampuan yang telah dituangkan dalam kurikulum perguruan tinggi tersebut di atas, termasuk pula dalam kurikulum IKIP Bandung, melalui program Pendidikan Umum yang diandalkan sebagai sarana pencapaiannya, tampak bahwa mahasiswa yang telah mengikuti MKDU, sebenarnya telah dapat diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab, yang merupakan pembekalan penting dalam rangka melaksanakan tugas dan peranannya sebagai guru. Namun demikian, beberapa hal yang patut dipertanyakan adalah :

1. Apakah dalam pelaksanaan program kurikulum itu, kemampuan-kemampuan yang telah dijabarkan telah benar - benar dikembangkan secara memadai ?
2. Apakah dalam pelaksanaannya, kemampuan-kemampuan itu telah benar-benar terukur sehingga terjamin penguasaannya oleh mahasiswa ?

Kedua pertanyaan di atas pada dasarnya menunjuk pada kejelasan tujuan pendidikan. Sebagian besar dari permasalahan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi, dalam upaya meningkatkan hasil belajar para mahasiswa, bertitik-tolak dari ketidakjelasan isi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan ini erat kaitannya dengan isi pembekalan yang akan diberikan kepada para peserta didik. Dikemukakan

oleh McKenzie, et al.(1972:101) bahwa upaya pendidikan dalam membuat kejelasan isi tujuan ini, jarang diperhitungkan secara sistematis, dan implikasi-implikasinya sering sekali tidak dapat dimengerti.

Ketidakjelasan penetapan tujuan lebih tampak lagi pada jenis program ilmu-ilmu sosial, yang bersifat sebagai pengajaran afektif seperti program Pendidikan Umum atau MKDU ini. Adapun pentingnya program tersebut dapat disimak dari kutipan ini (Dep. P dan K, 1983 : 8).

... Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi bertujuan mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan masyarakat, mereka dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang bahagia, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan falsafah Pancasila.

Rumusan di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan program MKDU adalah membentuk perilaku mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Namun isi sebuah tujuan inipun telah sangat luas, oleh karena memberi peluang penafsiran dari berbagai sudut lainnya. Contoh yang dikemukakan oleh Numan Somantri (1976 : 28), yaitu "... mendidik warga negara yang baik, ...dapat dilukiskan dengan "warga negara yang patriotik, toleran, loyal terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis...", memperlihatkan bahwa kekaburan dari sebuah konsep akan lebih sulit lagi apabila konsep tersebut dikomunikasikan dengan konsep-konsep lain yang juga sifatnya sangat umum. Numan Somantri menunjukkan pola pendapat Samuelson (1965) yang

mengemukakan bahwa dalam ilmu-ilmu sosial, "two different names are unknowingly being used for the same thing or the some words is being applied to two different phenomena" (Numan Somantri, 1976 : 74).

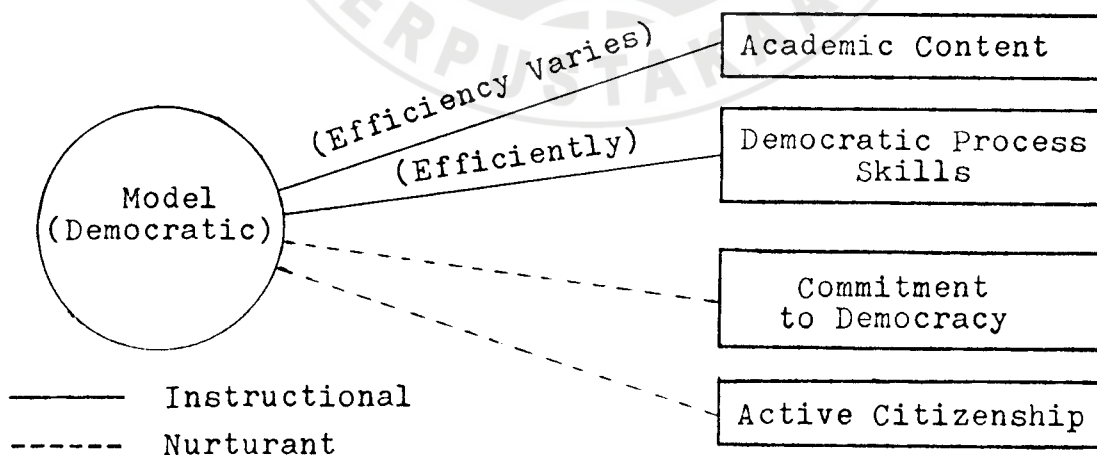
Terlalu luasnya isi tujuan pengajaran afektif demikian menyebabkan sulitnya dilakukan evaluasi terhadap keberhasilannya. McKenzie, dkk. (1972 : 10) mengatakan bahwa penggunaan bahasa untuk merumuskan sebuah tujuan (objective), seharusnya lebih operasional daripada perumusan sebuah cita-cita (aim). Cita-cita adalah jawaban terhadap pertanyaan mengapa suatu topik diajarkan, sedangkan tujuan adalah jawaban terhadap pertanyaan tentang apa yang akan dicapai apabila topik itu telah diajarkan. Dengan demikian instrumen penilaian hanya dapat bersumber dari tujuan, tidak dapat secara langsung bersumber dari cita-cita.

Di samping terlalu luasnya isi tujuan pengajaran dalam rangka pembentukan perilaku mahasiswa agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab ini, persoalan lainnya adalah yang berkenaan dengan bahan pengajaran itu sendiri. Sebagaimana diketahui, pembekalan yang disajikan agar dapat terbentuk perilaku yang diharapkan tersebut, tidaklah disajikan secara khusus dalam mata kuliah kewargaan negara, akan tetapi secara implisit atau terpadu dalam bahan mata kuliah Pendidikan Umum atau MKDU. Untuk hasil belajar yang pencapaiannya diperoleh melalui perpaduan content kurikulum demikian, Bruce Joyce dan Marsha Weil

menyebutnya sebagai "dampak penyerta" atau "dampak pengiring" (nurturant effects), yaitu hasil belajar yang diharapkan terbentuk, di samping yang merupakan dampak instruksional langsung dari hasil belajar content dan skills akademis yang disajikan. Mereka (1980 : 16-18) mengemukakan hal tersebut sebagai berikut :

The effects of an environment can be direct-- designed to come from the content and skills on which the activities are based. Or, effects can be implicit in the learning environment... the description of the effects of models can validly be categorized as the direct or instructional effects and the indirect or nurturant effects.

Dikatakan juga bahwa hasil belajar berbentuk kewarganegaraan aktif (active citizenship), dan kesepakatan terhadap demokrasi (commitment to democracy), misalnya, dapat diperoleh secara tidak langsung dari bentuk pengajaran yang didasari oleh content dan skills tentang hal democratic, dengan menetapkan academic content dan democratic process skills sebagai dampak instruksionalnya, yaitu sebagaimana tampak dalam Bagan 1 berikut ini.



Bagan 1. Model Pengajaran tentang Kewarganegaraan
(Bruce Joyce dan Marsha Weil, 1980 : 18)

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil belajar yang ditetapkan sebagai salah satu tujuan program MKDU di perguruan tinggi, yaitu terbentuknya perilaku agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang menjadi topik penelitian ini, serta yang masih merupakan konsep teoritis, akan dijabarkan dalam konsep empirisnya menjadi pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Pemahaman ini terbentuk sebagai dampak pengiring dari hasil belajar yang secara langsung diperoleh melalui setiap mata kuliah MKDU.

Tercapai tidaknya hasil belajar yang diharapkan, terutama yang merupakan pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab demikian, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berkenaan dengan hal ini Numan Somantri antara lain mengemukakan bahwa hal tersebut dapat terbentuk "dari pendidikan di rumah dan pendidikan di luar kelas sekolah" (1976 : 48).

Dan sependapat dengan rumusan ini, B. Frank Brown (1977: 6) menyatakan :

... the entire responsibility for civic education cannot be fostered on the schools. Other institutions: local, state, and federal governments, along with the television medium---have a major role to play in the reconceptualization of education for responsible citizenship.

Kedua rumusan di atas menunjukkan berbagai faktor yang pada dasarnya mempengaruhi terbentuknya perilaku

sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, yang terbatas pada pengkajian faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan dari hasil belajar formal di sekolah melalui program Pendidikan Umum atau MKDU, maka penentuan faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai hubungan demikian akan dicari dari faktor pada diri mahasiswa itu sendiri.

Faktor internal yang dimaksud adalah persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum atau MKDU. Persepsi mahasiswa tentang program tersebut akan mempengaruhi tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan dalam mengikuti perkuliahan MKDU. Hal ini akan tercermin pada hasil belajarnya, dalam hal ini berbentuk pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Di samping itu terdapat pula faktor eksternal yang diramalkan mempengaruhi hasil belajar yang diharapkan itu. Latar belakang sosial-budaya, khususnya status sosial ekonomi dan pola pendidikan orang tua, diperkirakan akan mempengaruhi sikap, minat, dan perilaku serta gaya hidup seseorang di dalam lingkungan sosialnya, yaitu di dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang dihayatinya. Dalam penelitian ini situasi kehidupan yang harus dihadapi oleh para mahasiswa IKIP Bandung adalah program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh para mahasiswa IKIP Bandung khususnya, akan mempengaruhi sikap

serta pemahaman mereka tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab, yang merupakan ciri keikutsertaan mereka dalam program pembangunan tersebut.

Berdasarkan gejala ini dapat disimpulkan tepat tidaknya persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum, tinggi rendahnya latar belakang sosial ekonomi, baik buruknya pola pendidikan orang tua, seluruhnya akan mempengaruhi tercapainya perilaku yang diharapkan.

B. Masalah yang Diteliti

Program Pendidikan Umum di IKIP Bandung, yang mata kuliahnya disebut Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), keberhasilannya ditandai dengan dimilikinya kepekaan terhadap masalah sosial-budaya oleh para mahasiswa. Tingginya pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kepekaan terhadap masalah sosial - budaya itu dan merupakan faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan program.

Pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada dirinya dan yang terdapat di luar dirinya, antara lain oleh kebutuhan-kebutuhannya, tujuan-tujuannya, kondisi dan latar belakang kehidupannya. Atau dengan perkataan lain, pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab dipengaruhi dan berkaitan dengan

persepsi dirinya tentang program Pendidikan Umum, dan dengan latar belakang sosial-budayanya, dalam hal ini status sosial ekonomi dan pola pendidikan orang tua.

Penelitian ini dipusatkan kepada masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan pokok sebagai berikut: "Sejauh manakah kualitas persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum yang telah diikutinya, dan kualitas status sosial ekonomi orang tua, serta kualitas pola pendidikan orang tua, berkontribusi terhadap pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab ?".

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan variabel-variabel sebagai berikut :

- (1) Variabel pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab sebagai variabel tak bebas atau terikat, atau variabel terpengaruh, atau disebut juga sebagai variabel dependen (dependent variable);
- (2) Variabel persepsi sebagai variabel pengaruh atau variabel independen (independent variable);
- (3) Latar belakang sosial budaya, yang di sini diwakili oleh dua variabel, yaitu variabel status sosial ekonomi orang tua dan variabel pola pendidikan orang tua, masing-masing merupakan variabel independen.

1. Variabel Pemahaman tentang Perilaku Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab, merupakan salah satu hasil belajar yang diandalkan sarana pencapaiannya melalui program Pendidikan Umum atau MKDU. Hal ini tertuang dengan jelas dalam penetapan tujuan Pendidikan Umum di perguruan tinggi, sebagaimana telah diutarakan dalam uraian di muka, yaitu untuk mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan masyarakat, mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Penekanan akan pentingnya pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab tersebut, sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Bangsa Indonesia dan berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu pembentukan manusia seutuhnya. Disadari bahwa mendidik mahasiswa sesuai dengan tujuan-tujuan di atas, bukan semata-mata untuk pemilikan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta berbagai kemahiran lainnya sebagai kompetensi profesional. "Hidup dan peran seseorang dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jauh lebih paripurna sifatnya dari sekedar manusia berilmu, terampil atau ahli belaka" (Dep. P dan K, 1983 : 6).

Pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab dalam penelitian ini ditandai oleh pengetahuan mahasiswa terhadap berbagai hal yang menyangkut pemerintahan dan program-program pemerintah, serta oleh kecenderungan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan

kepentingan umum. Tinggi rendahnya pemahaman tersebut, dipengaruhi, baik oleh faktor-faktor yang berasal dari diri mahasiswa itu sendiri (faktor kepribadian), maupun oleh faktor-faktor yang berasal dari luar pribadinya.

Bertitik-tolak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab adalah variabel tergantung atau terikat atau tak bebas, atau variabel dependen (dependent - variable), yang berarti dapat dipengaruhi atau mempunyai kaitan dengan variabel lain, dalam hal ini variabel persepsi dan variabel status sosial ekonomi serta variabel pola pendidikan orang tua.

2. Variabel Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Banyak ahli yang telah mengemukakan pentingnya peranan persepsi seseorang. Orang-orang yang berlainan melihat obyek-obyek yang sama pada waktu yang bersamaan, tetapi dengan persepsi yang berbeda mungkin akan melihat hal yang berbeda. Mar'at (1984 : 22) mengemukakan bahwa "persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya". Dalam arti yang serupa, Basset dan Smythe (1979 : 51) merumuskan bahwa persepsi adalah proses penerimaan dan pemberian arti pada stimulus yang datang, atau dengan kata lain adalah cara-cara seseorang memperlakukan informasi yang masuk. Dari uraian di atas tampak bahwa faktor-faktor persepsi

dapat membantu untuk memahami perbedaan-perbedaan pandangan yang timbul di antara manusia.

Persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum atau MKDU, ditampilkan dalam penelitian ini sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi terbentuknya pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan bentuk pemahaman itu diandalkan pencapaiannya di perguruan tinggi, termasuk IKIP Bandung, melalui program Pendidikan Umum atau MKDU.

Persepsi yang tepat dari para mahasiswa tentang program Pendidikan Umum yang diselenggarakan, memberikan pengaruh yang baik pula terhadap hasil belajar yang diharapkan dari MKDU itu.

Atas dasar pemikiran di atas, maka variabel persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum atau MKDU dalam penelitian ini dipandang sebagai variabel independen (independent variable) yang dapat mempengaruhi variabel lain.

3. Variabel Status Sosial Ekonomi

Masyarakat memiliki keragaman anggotanya berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Di dalam masyarakat terjadi atau terdapat pengelompokan dan penggolongan atas dasar keragaman itu. Pengelompokan dalam struktur masyarakat umumnya didasarkan pada tingkat umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, bahasa dan agama.

Berdasarkan pengelompokan itu, dikenal adanya "Kelas Atas (Upper Class), Kelas Menengah (Middle Class) dan Kelas Bawah (Lower Class)" (Krech, et al., 1982 : 314). Masing-masing kelompok, kelas atau lapisan tersebut membentuk lingkungan sosialnya sendiri yang mempengaruhi pula tingkah laku para anggotanya. Setiap kelompok atau golongan dalam masyarakat memperlihatkan karakteristik tersendiri yang membedakannya dari kelompok lain. Dengan perkataan lain, mahasiswa dengan status sosial ekonomi tertentu, mempunyai kecenderungan bertingkah laku tertentu, yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya.

Atas dasar pemikiran di atas, maka variabel status sosial ekonomi dalam penelitian ini dipandang sebagai variabel independen (independent variable), seperti halnya persepsi.

4. Variabel Pola Pendidikan Orang Tua

Adapun yang dimaksud dengan latar belakang sosial-budaya dalam penelitian ini, adalah latar belakang kehidupan mahasiswa ditinjau dari dua segi. Segi pertama berdasarkan status sosial ekonomi seperti dikemukakan di atas, segi kedua berdasarkan sistem nilai budaya yang dianut mahasiswa yaitu di sini pola pendidikan orang tua.

Berkaitan dengan masalah tersebut, tim Dep.P dan K yang telah mengadakan penelitian terhadap mahasiswa di Indonesia pada tahun 1977/1978, memberikan gambaran bahwa "pengaruh orang tua terutama ayah cukup besar terhadap

pembentukan kepribadian mahasiswa, dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh lain di luar lingkungan keluarga" (Analisis Pendidikan, 1981 : 90).

Pola pendidikan orang tua ini dicirikan oleh tiga buah tipe sikap, yaitu memiliki, menguasai, dan demokratis (Shoben, 1963 : 36-37 dan E. M. Drews, 1963 : 35), sebagaimana akan dijelaskan kemudian secara terinci pada bab landasan teoritis. Dengan demikian variabel pola pendidikan orang tua terdiri atas 3 sub variabel sesuai dengan ciri-ciri di atas, yaitu :

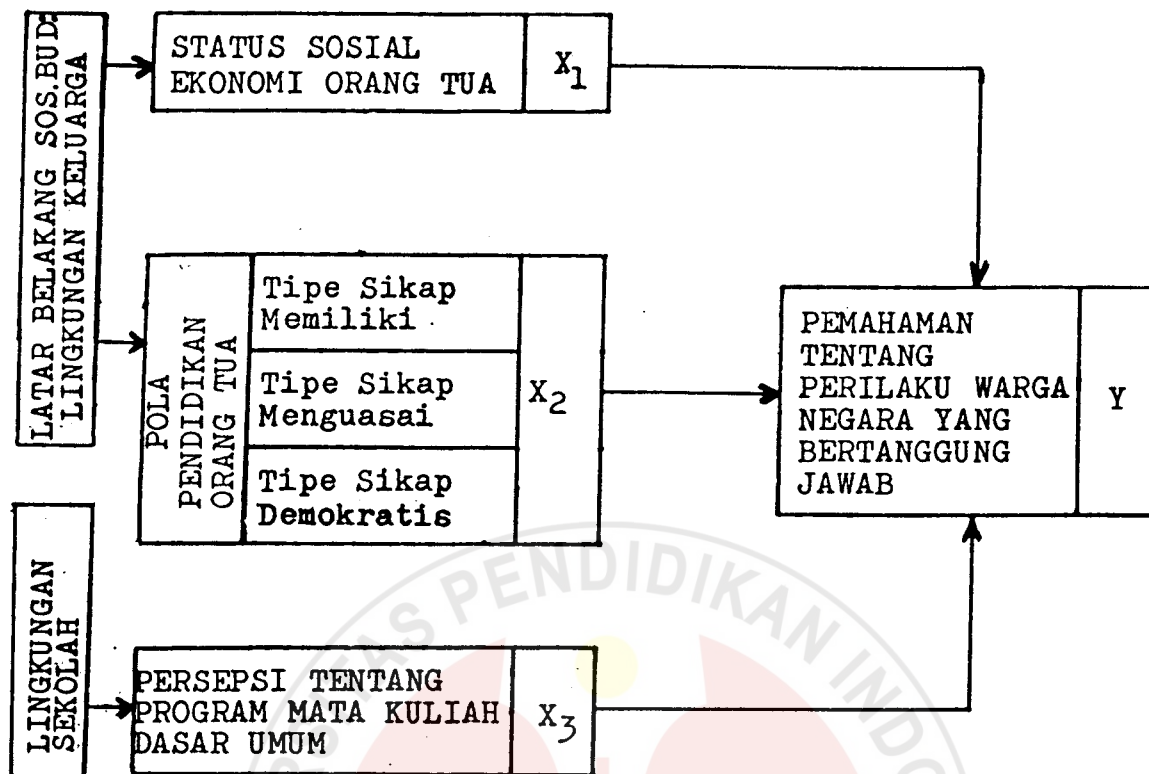
- a. sub variabel tipe sikap memiliki,
- b. sub variabel tipe sikap menguasai, dan
- c. sub variabel tipe sikap demokratis.

Ketiga sub variabel pola pendidikan orang tua tersebut dalam penelitian ini dipandang sebagai sub variabel independen.

Adapun model hubungan antar variabel-variabel di atas, agar jelasnya adalah sebagaimana tampak dalam Bagan 2 Paradigma Penelitian, yang diterakan pada halaman berikut.

C. Tujuan Penelitian

Masalah pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab merupakan masalah yang penting untuk dikaji. Keberhasilan suatu program pendidikan tinggi ditandai oleh hasil belajar mahasiswa yang menunjukkan kemampuan-kemampuan yang diharapkan terbentuk.



Bagan 2. Paradigma Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Mengadakan eksplorasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pemahaman tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab di antara para mahasiswa IKIP Bandung, yaitu persepsi mahasiswa tentang program Pendidikan Umum atau MKDU, serta latar belakang sosial budayanya, dalam hal ini status sosial ekonomi dan pola pendidikan orang tua.
- (2) Menganalisis hubungan yang ada, antara faktor-faktor tersebut di atas dengan pembentukan pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung

jawab pada para mahasiswa IKIP Bandung.

- (3) Mendeskripsikan karakteristik-karakteristik mahasiswa IKIP Bandung yang telah mengikuti 5 dari keenam Mata Kuliah Dasar Umum yang berhubungan dengan pemahaman mereka tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

D. Pentingnya Masalah yang Diteliti

Dengan tujuan-tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan formal, informal maupun non formal, dari segi teori maupun dari segi praktis.

Dari segi teori, hasil penelitian ini selain dapat merupakan tambahan pengetahuan yang telah ada, yang berkenaan dengan hubungan antara karakteristik - karakteristik mahasiswa, dapat pula merupakan tambahan pengetahuan teoritis yang lebih mengkhusus pada pembentukan pemahaman mahasiswa tentang perilaku warga negara yang bertanggung jawab, yang diandalkan keberhasilannya di perguruan tinggi melalui program Pendidikan Umum atau MKDU.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan bagi para pengelola atau perencana pendidikan, khususnya program Pendidikan Umum atau MKDU, sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan aktivitas peningkatan mutu belajar mahasiswa.

